

**TINJAUAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN HAK JAMINAN
SOSIAL PEKERJA YANG DI PHK
(PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA)**

SKRIPSI

Oleh:

Muntomi

201610115106



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

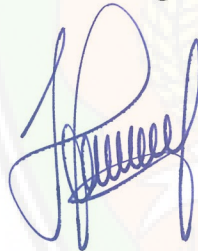
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak
Jaminan Sosial Pekerja Yang di PHK
(Pemutusan Hubungan Kerja)

Nama Mahasiswa : Muntomi
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115106
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 27 Juli 2020

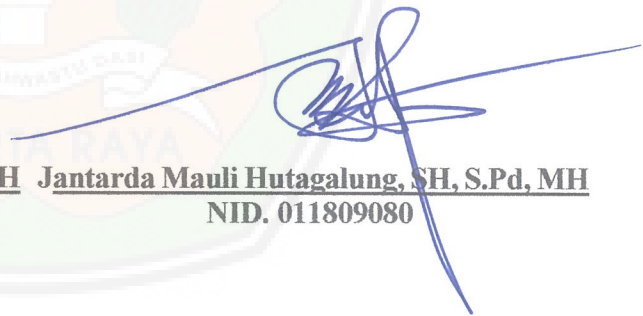
MENYETUJUI,

Pembimbing I



Anggreany Haryani Putri, SH, MH
NID. 011506039

Pembimbing II



Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH
NID. 011809080

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak
Jaminan Sosial Pekerja Yang Di PHK
(Pemutusan Hubungan Kerja)

Nama Mahasiswa : Muntomi
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115106
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 27 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, SH, MH
NID. 010403011

Penguji I : Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NID. 011606045

Penguji II : Anggreany Haryani Putri, SH, MH
NID. 011506039

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH
NIP. 1901377

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muntomi
NPM : 201610115106
TTL : Tegal, 19 Maret 1987
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Jaminan Sosial Pekerja Yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 27 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,


Muntomi



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muntomi
NPM : 201610115106
TTL : Tegal, 19 Maret 1987
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA YANG DI PHK (PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA)”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Juli 2020

Yang membuat pernyataan


Muntomi



v

ABSTRAK

Muntomi, 201610115106, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Jaminan Sosial Pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)*

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan permasalahan yang sering terjadi didalam hubungan kerja. Berakhirnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dapat terjadi karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dan karena adanya perselisihan hubungan industrial. Pengusaha maupun pihak tenaga kerja harus berupaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, selama belum ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka pengusaha wajib melaksanakan kewajibannya terhadap pekerja. Dalam praktiknya, terdapat peristiwa dimana pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pekerja yang proses pemutusan hubungan kerjanya belum memiliki kekuatan hukum tetap diantaranya adalah mengeluarkan pekerja dari kepesertaan jaminan sosial BPJS Baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang diputus hubungan kerjanya untuk memperjuangkan haknya berupa jaminan sosial dan untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pengusaha jika tidak menjalankan kewajibannya terhadap pekerja yang diputus hubungan kerjanya menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.

Keharusan pengusaha untuk tetap melaksanakan segala kewajibannya kepada pekerja dalam proses pemutusan hubungan kerja diatur dalam ketentuan pasal 155 ayat 2 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam prakteknya banyak pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar hak-hak pekerja dan mengeluarkan pekerja dari kepesertaan jaminan sosial. Untuk memperjuangkan haknya pekerja dapat melakukan upaya hukum. Selain melakukan upaya hukum pekerja harus melaporkan diri kepada BPJS tempat pekerja terdaftar sebagai peserta jaminan sosial. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 2 (dua) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang diputus hubungan kerja (PHK) untuk memperjuangkan haknya berupa jaminan sosial yaitu melalui upaya penyelesaian di pengadilan (*litigasi*) maupun penyelesaian di luar pengadilan. Upaya penyelesaian diluar pengadilan antara lain melalui cara Bipartit, Konsiliasi, Mediasi. Upaya hukum lainnya adalah mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri.

Kata Kunci, Pelanggaran Hak Pekerja, Jaminan Sosial, PHK

ABSTRACT

Muntomi, 201610115106, Judicial Review on Social Security Rights Violation on Termination of Employment Cases.

Termination of employment is a common problem in the work industry. The termination of employment between employers and workers can occur due to expiration of the employment agreement and due to industrial disputes. Employers and Labour parties must strive to prevent termination of employment. In the event of termination of employment, as long as no stipulation from the industrial relations dispute resolution institute, entrepreneurs must carry out their obligations to the workers. As a matter of fact, there is an event occurs where employers do not carry out its obligations on workers whose work termination process has not had the legal force remained among them is (from the social security membership BPJS both BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan).

This research was conducted to find out the legal remedies that can be done by the workers who are disconnected to fight for the right of social security and to know the legal sanctions on employers if they do not carry out their obligations to workers who are disconnected under the law No. 13 year 2003 on employment. The method utilized in this research is the normative juridical method.

The obligation of the entrepreneur to carry out all its obligations to the workers in the process of termination of employment is governed by article 155 paragraph 2 of the law No. 13 year 2003 on employment. In practice many entrepreneurs do not fulfill their obligations to pay workers rights and remove workers from the membership of social security. To fight for the rights of workers can make legal efforts. In addition to legal efforts workers must report themselves to BPJS where workers are registered as social security participants. Based on the results there are 2 (two) legal remedies that can be done by the worker to fight for the rights of social security, namely through a settlement effort in a court (litigation) and a settlement outside the court. Settlement efforts outside the courts, among others, are bipartite, conciliation, mediation. Another legal remedy is to file a lawsuit in the Industrial Relations Court of the District Court.

Keywords, worker rights violations, social security, PHK

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan nikmat sehat dan kesempatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA YANG DI PHK (PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA)” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

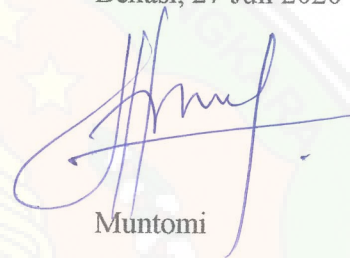
Dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Drs. Bambang Karsono, SH, MM, Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Anggreany Haryani Putri, SH, MH, selaku dosen pembimbing I (materi) yang telah memberikan dan mengorbankan waktunya dalam membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH, selaku dosen pembimbing II (teknis) yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
5. Dosen Fakultas Hukum dan seluruh sivitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan dalam pendidikan Penulis.
6. Ibuku Sunipah, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberikan pendidikan seorang diri kepada Penulis.
7. Istriku Ulfatul Laeli dan anak-anakku Adyla Aulia Ramadhani, Almyra Amalia Putri, dan Arsyila Ilymy Qanita, yang telah sabar dalam memberikan dorongan kepada Penulis untuk menyelesaikan Pendidikan sarjana.

8. Indriani Ismail dan Bunawan Chandra, selaku Direksi PT. Muarateweh Spring yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyeimbangkan antara Pekerjaan dan Pendidikan.
9. Teman-teman Fakultas Hukum yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, walaupun penulis telah berusaha sebaik mungkin. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan penyusunan dan penulisan skripsi ini.

Bekasi, 27 Juli 2020



Muntomi



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Teoritis	7
1.6. Kerangka Konseptual.....	8
1.7. Kerangka Pemikiran	10
1.8. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Perlindungan Hukum	13
2.2. Kepastian Hukum	14
2.3. Hukum Ketenagakerjaan	15
2.4. Hubungan Kerja.....	17
2.5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hubungan Kerja.....	18

2.5.1. Hak dan Kewajiban Pengusaha	18
2.5.2. Hak dan Kewajiban Pekerja/buruh.....	18
2.6. Perselisihan Hubungan Industrial	19
2.7. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	20
2.7.1. Pemutusan hubungan kerja oleh Pengusaha.....	21
2.7.2. Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pekerja	22
2.7.3. Pemutusan hubungan kerja (PHK) demi hukum.....	22
2.7.4. Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengadilan	23
2.8. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	23
2.8.1. Jaminan Kesehatan.....	24
2.8.2. Jaminan Kecelakaan Kerja.....	26
2.8.3. Jaminan Kematian	28
2.8.4. Jaminan Hari Tua	29
2.8.5. Jaminan Pensiun.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Pendekatan Penelitian.....	34
3.2. Bahan Hukum	34
3.2.1. Bahan hukum primer.....	34
3.2.2. Bahan hukum sekunder	35
3.2.3. Bahan hukum tersier.....	35
3.3. Metode Pengumpulan Data	36
3.4. Analisa Data	36
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN.....	38
4.1. Pembahasan Rumusan Masalah I	38
4.2. Pembahasan Rumusan Masalah II	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1. Simpulan.....	74
5.2. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Ketentuan Sanksi Pidana Kurungan dan Pidana Denda.....	68
Tabel 4.1. Ketentuan Sanksi Administrasi.....	69



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

Ibuku tercinta

Istri dan Anak-anaku tersayang

Sahabat seperjuangan